



ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BONTANG 2018



ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2018 (METODE BARU)

No. Publikasi: 6474.1814

Katalog BPS: 4102002.6474

Ukuran Buku: 14,5 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 98 halaman

Naskah:

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Penyunting:

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Desain Kover:

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Diterbitkan oleh:

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Dicetak oleh: CV. Ina Bersaudara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Kominfo dan Statistik Kota Bontang

SAMBUTAN WALIKOTA

Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Analisa Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2018 dapat diterbitkan.

Publikasi ini merupakan publikasi berkelanjutan dari tahun sebelumnya yang disusun sebagai kerangka perencanaan dengan memanfaatkan paradigma pembangunan manusia sebagai titik strategis dalam pembangunan. Diharapkan publikasi ini dapat berfungsi sebagai input di dalam perencanaan, penyusunan kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam rangka menguatkan Bontang sebagai kota maritim, berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini sehingga dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga publikasi ini membawa banyak manfaat.

Bontang, Juli 2018
Walikota Bontang

dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG.

DAFTAR ISI

Sambutan Walikota	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	Error! Bookmark not defined. vii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	8
1.3 Fungsi, Lingkup Dan Keterbatasan	9
Bab 2 Formula Dan Metode Perhitungan	13
2.1 Pengukuran IPM	13
2.1.1. Angka Harapan Hidup (E0)	19
2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah (Mys) Dan Angka Harapan Lama Sekolah (Eys)	20
2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)	22
2.1.4. Pertumbuhan IPM.....	23
2.2 Definisi Operasional Indikator Terpilih.....	24
Bab 3 Gambaran Umum Kota Bontang	29
3.1 Kondisi Umum Wilayah.....	29
3.2 Kondisi Sosial	30
3.2.1 Kependudukan	30
3.2.2 Gambaran Pendidikan.....	37
3.2.3 Gambaran Kesehatan	46
3.2.4 Gambaran Ketenagakerjaan.....	54

3.2.5	Gambaran Perekonomian.....	60
Bab 4	Status Pembangunan Manusia.....	69
4.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang	71
4.1.1	Angka Harapan Hidup	74
4.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah (Eys).....	76
4.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	79
4.1.4	Rata-Rata Pengeluaran Riil.....	82
4.2	Perkembangan IPM Kota Bontang 7 Tahun Terakhir	86
4.3	Kecepatan Mencapai Angka IPM Ideal (Reduksi Shortfall).....	87
4.4	Keterbandingan IPM Antar Kab/Kota di Provinsi Kaltim	88
Bab 5	Penutup	93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM.....	18
Tabel 2.2.	Kriteria Status Pembangunan Manusia	19
Tabel 2.3.	Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	21
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bontang, 2011-2017.....	31
Tabel 3.2.	Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang, 2011-2017	37
Tabel 3.3.	Jumlah Sekolah di Kota Bontang, 2011-2017	40
Tabel 3.4.	Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan 2011-2017	41
Tabel 3.5.	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2011-2017.....	43
Tabel 3.6.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, 2017	45
Tabel 3.7.	Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, 2011—2017	49
Tabel 3.8.	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2016-2017	50

Tabel 3.9.	Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tngga Kota Bontang, 2017	52
Tabel 3.10.	Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2012-2017 ...	57
Tabel 3.11.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bontang, 2012-2017 ...	59
Tabel 3.12.	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017	61
Tabel 3.13.	Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2017**	65
Tabel 3.14.	Perkembangan PDRB Per Kapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (Ribu Rupiah), 2010–2017**	68
Tabel 4.1.	Capaian AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran Riil Kota Bontang, 2011-2017.....	85
Tabel 4.2.	Perbandingan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016-2017.....	87
Tabel 4.3.	Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia.....	1
Gambar 2.1. Perubahan Metodologi IPM.....	14
Gambar 2.2. Tahapan Perhitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan.....	22
Gambar 2.3. Perhitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan.....	23
Gambar 3.1. Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan	32
Gambar 3.2. Perkembangan Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Kecamatan, 2015-2017	33
Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Bontang, 2017	34
Gambar 3.4. Persentase Penduduk Tidak Produktif Kota Bontang, 2017.....	36
Gambar 3.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2017	53
Gambar 3.6. Sinergitas Pembangunan dan Ketenagakerjaan.....	54
Gambar 3.7. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2011-2017	56
Gambar 3.8. Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2017	63
Gambar 4.1. Pembangunan Manusia Kini dan Akan Datang.....	69
Gambar 4.2. Dimensi, Indikator, dan Indeks Penyusun IPM.....	71
Gambar 4.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang (Tahun), 2011-2017	74

Gambar 4.4. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Tahun), 2016-2017	75
Gambar 4.5. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Kota Bontang, 2011-2017	77
Gambar 4.6. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2016-2017	78
Gambar 4.7. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) Kota Bontang, 2011-2017	80
Gambar 4.8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (tahun), 2017.....	81
Gambar 4.9. Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2011-2017	82
Gambar 4.10. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (000 rupiah), 2017	83
Gambar 4.11 Perkembangan IPMKota Bontang, 2011-2017.....	86
Gambar 4.12. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2016-2017	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sedangkan pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Fokus dan sasaran akhir pembangunan manusia antara lain tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan proses capaian pendidikan, keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).



Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia

Sumber: UNDP, 2015

Konsep pembangunan manusia telah mengalami pergeseran makna seiring perkembangan cara pandang manusia. Jika beberapa dekade yang lalu, pembangunan manusia diukur hanya berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, maka sekarang konsep tersebut telah berkembang. Dimensi pembangunan manusia terdiri dari dua aspek sebagaimana terlihat pada gambar 1. Aspek pertama adalah peningkatan kemampuan manusia (peningkatan waktu hidup yang lebih sehat dan lama, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar hidup yang layak), kemudian yang kedua adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia (partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman) (UNDP, 2015).

Berakhirnya MDGS di tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan agenda baru di tahun 2016, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang lebih komprehensif dan transformatif. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 Tujuan tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs (Bappenas, 2016).

Dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir

pada tahun 2015 silam yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Berakhirnya MDGS di tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan agenda baru di tahun 2016, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang lebih komprehensif dan transformatif. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 Tujuan tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs (Bappenas, 2016).

Pada tingkat nasional, agenda pembangunan pemerintah Nawacita juga mengangkat pembangunan manusia sebagai isu penting yang harus menjadi prioritas. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah

akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melakukan dua program, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019 (BPS, 2018).

Menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP) (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian pembangunan manusia.

2. Ekuitas

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan itu.

3. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, dan lingkungan hidup, harus dilengkapi.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Publikasi *Human Development Report* (HDR) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian harus ada peningkatan cara

pandang yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat dari peningkatan bidang ekonomi semata, juga ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan manusia (*human development*) didefinisikan sebagai perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia harus dipacu untuk menjadi semacam model pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Di antaranya berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga dapat diciptakan peluang kerja melalui perluasan dan produktivitas (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri sehingga penduduk diberdayakan dalam menentukan harkat martabat manusia pada partisipasi pembangunan.

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Model pembangunan manusia adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep lebih luas dari pada model dengan pendekatan pembangunan SDM, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif dan bersifat holistik.

Pilihan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun di antara sejumlah pilihan ini, ada tiga pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya.

Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan, maka pembangunan manusia

IPM diciptakan dengan penekanan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, jadi bukan hanya pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2015)

harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sejak tahun 1990 *United Nations* (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai alat untuk mengukur/mengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

1.2 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang 2018

pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2017.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota sangat penting, mengingat proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini yang tentunya terjadinya pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2017 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2017 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2017 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

1.3 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Merupakan suatu kemustahilan jika pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan suatu indeks komposit, tak peduli berapa banyak komponen indikatornya (apalagi mengingat bahwa makin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit, makin besar pula kemungkinan *error* yang dapat ditimbulkan).

IPM juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Akan tetapi di balik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific (SIAP)* merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung

IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan gender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan gender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM, penghitungan IPJ memperhatikan ketidaksamaan gender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan gender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi.

IPM dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*). Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup

(meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan (dalam IPM metode baru 2010 menjadi pencapaian tingkat pendidikan), dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka indeks kepuasan masyarakat/IKM mengukur *magnitude* (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR)–*Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya,

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengeksekusi hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

BAB 2

FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN

2.1 PENGUKURAN IPM

Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

1. Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
2. Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator berdasarkan pada pendekatan masukan (input) dan pendekatan hasil (output). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang mempengaruhi disebut sebagai indikator sektoral.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1990 hingga 2014, metodologi penghitungan IPM sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jika di tahun 1990 komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Anak Masih Hidup (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Pada tahun 2010, UNDP mengubah komponen yang digunakan yaitu: AHH, Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB). Perubahan metode penghitungan IPM sebagaimana disajikan pada gambar 2.



Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan upgrading metodologi penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antar lain :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100%), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB

menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan :

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{\text{pengadaan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk.
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di peroleh dari sumber data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia, UNDP menetapkan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator yang juga menjadi acuan BPS dalam menghitung IPM hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Standar nilai untuk menghitung IPM disajikan dalam table 2.1.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM

Komponen IPM	Nilai* Maksimum	Nilai* Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli	26.572.352 ^{a)} (Rp.)	1.007.436 ^{a)} (Rp.)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

^{a)} daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025

^{b)} daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)

^{*}) Nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994:108) kecuali untuk Purchasing Power Parity (PPP)

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
- Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status

menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e0)

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” dalam masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2017 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk.

Untuk mengukur lama hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau *life expectancy at birth* (e0) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan

asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Tampaknya tidak ada yang meragukan e_0 sebagai ukuran usia hidup. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam e_0 , tetapi juga segi “sehat”. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan.

Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, karena UNDP juga menggunakan e_0 sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS). Konversi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah sebagaimana disajikan dalam table 2.3.

Tabel 2.3. Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar (SD)	6
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	9
4. Sekolah Menengah (SMU & yang sederajat)	12
5. Diploma I (DI)	13
6. Diploma II (DII)	14
7. Akademi/Diploma III (DIII)	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. S2	18
10. S3	21

Sumber: BPS Kota Bontang

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)

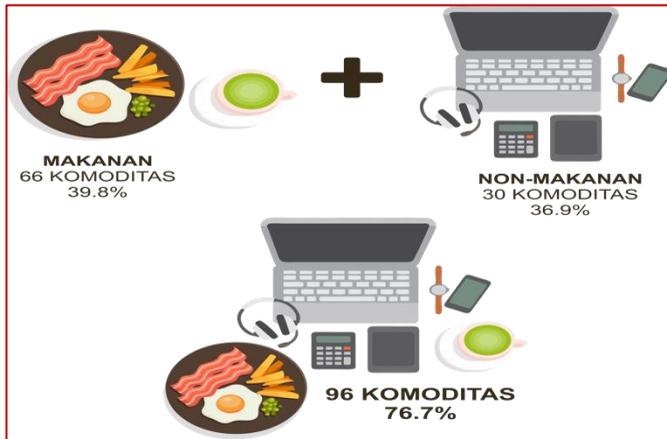
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan dihitung dari level propinsi hingga kabupaten dan kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat constant/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.



Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Gambar 2.3. menunjukkan bahwa 39,8% pengeluaran untuk bahan makanan dan 36,9 persen untuk non makanan.



Gambar 2.3. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan)
 Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Rumus penghitungan paritas daya beli (PPP) adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} = harga komoditas i di kab/kota j
 p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m = jumlah komoditas

2.1.4. Pertumbuhan IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu.

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan menggunakan rata-rata reduksi shortfall per tahun (Annual Reduction in Shortfall). Nilai “shortfall” secara sederhana mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah nilai IPM sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat yang lebih tinggi.

Cara penghitungan “Shortfall” dinyatakan dengan rumus:

$$\left[\frac{IPM_{(t+n)} - IPM_{(t)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t)}} \times 100 \right]^{1/n}$$

Dimana :

$IPM_{(t)}$: IPM pada tahun ke $-t$

$IPM_{(t+n)}$: IPM tahun ke $t+n$

IPM_{ref} : IPM acuan (biasanya IPM ideal)

2.2 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TERPILIH

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah beragam persoalan pembangunan manusia selama ini serta bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara benar dan terukur diperlukan adanya suatu ukuran indikator yang reliable dan handal. Berikut beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam hal pembangunan manusia:

- **Rasio jenis kelamin:** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan:** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah:** penduduk usia 25 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah:** harapan penduduk usia 7 tahun ke atas untuk dapat bersekolah.
- **Angka Partisipasi Murni SD:** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
- **Angka Partisipasi Murni SLTP:** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.
- **Angka Partisipasi Murni SLTA:** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.
- **Jumlah penduduk usia sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun.
- **Bekerja:** Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja:** Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.

- **Angka Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis:** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).
- **Angka Harapan Hidup waktu lahir:** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.
- **Angka Kematian Bayi:** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

- **Persentase rumah tangga beratap layak:** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik:** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik:** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
- **Penduduk Miskin:** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.
- **Garis Kemiskinan:** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).

BAB 3

GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

3.1 KONDISI UMUM WILAYAH

Secara geografis Kota Bontang terbentang pada 117°23' sampai 117°38' Bujur Timur serta di antara 0°01' sampai 0°12' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah datar, landai, dan berbukit. Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan UU no 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 497,57 km².

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kota Bontang dibagi secara berjenjang menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Wilayah Kota Bontang di dominasi oleh laut yang luasnya mencapai kurang lebih 70 persen dari luas keseluruhan daerah ini. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling luas diantara 3 kecamatan yang ada yakni sebesar 109,24 km² (21,95%).

Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah lain di luar Kota Bontang. Batasan administratif Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Kota Bontang merupakan daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Selama tahun 2017 Suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan Mei dengan rata-rata sebesar 27,38 °C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 24,09 °C. Sementara itu kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan November hingga Desember dengan besarn 97,02 persen. Jumlah hari hujan selama tahun 2017 bervariasi setiap bulan, yakni antara 15 hingga 23 hari. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan mencapai 305,20 mm³.

3.2 KONDISI SOSIAL

3.2.1 KEPENDUDUKAN

Sebagai kota Industri, Bontang masih menjadi tujuan pencari kerja. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bontang dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2017, penduduk Kota Bontang telah mencapai 170.611 jiwa atau naik sebesar 3,74 persen dari tahun sebelumnya (lihat tabel 3.1). Dengan luas daratan yang hanya 15.822,76 ha¹, menjadikan Bontang sebagai salah satu kota terpadat di Kalimantan Timur dimana

¹ Perda 1/2016 Kota Bontang

tiap kilometer wilayah daratannya dihuni sebanyak 1.128 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk Kota Bontang terdiri dari penduduk perempuan sebesar 81.331 jiwa (47,67%) dan penduduk laki-laki sebesar 89.280 jiwa (52,33%).

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bontang, 2011 – 2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	77.714	70.697	148.412	110
2012	79.723	72.366	152.089	111
2013	81.718	74.162	155.880	110
2014	83.641	75.974	159.614	110
2015	85.522	77.804	163.326	110
2016	87.297	79.571	166.868	110
2017	89.280	81.331	170.611	110

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas diolah)

Tabel 3.1. memperlihatkan bahwa rasio jenis kelamin (RJK) Kota Bontang pada Tahun 2017 adalah sebesar 110. Angka 110 menunjukkan terdapat 110 jiwa penduduk laki-laki per 100 jiwa penduduk perempuan. Artinya, penduduk laki-laki Kota Bontang lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan dan kondisi ini tidak berubah bahkan sejak tahun 2001.

Ditinjau berdasarkan kecamatan (lihat gambar 3.1.), Bontang Utara merupakan kecamatan dengan penduduk terbesar. Pada tahun 2017 penduduk Kecamatan Bontang Utara mencapai 67.883 jiwa. Hal ini

dimaklumi karena Kecamatan Bontang Utara merupakan pusat pemerintahan sejak berdirinya Kota Bontang hingga tahun 2014, dimana pada tahun 2014 pusat pemerintahan dipindahkan ke Kecamatan Bontang Selatan. Sehingga penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Bontang Utara, ditambah lagi dengan adanya pusat perbelanjaan dan pusat Industri Pupuk Kaltim. Sementara itu Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat memiliki penduduk masing-masing

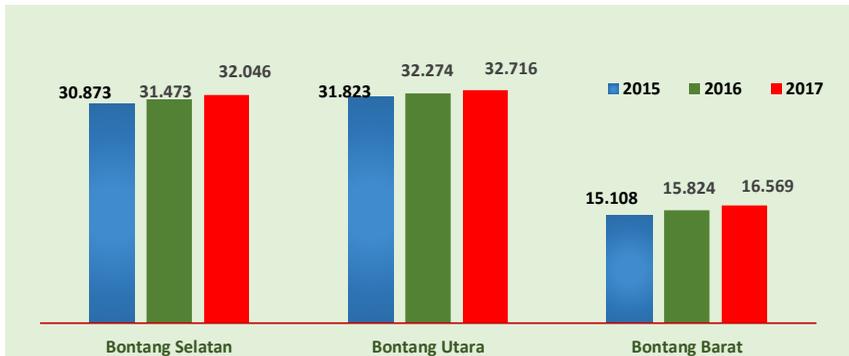


sebesar 66.755 jiwa dan 35.018 jiwa.

Gambar 3.1. Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2017

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2017, Kecamatan Bontang Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk paling besar yaitu sebesar 4,70 persen jika dibandingkan tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya kompleks perumahan yang dibangun di daerah ini. Sedangkan Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara berturut-turut adalah 1,82 persen dan 1,37 persen.

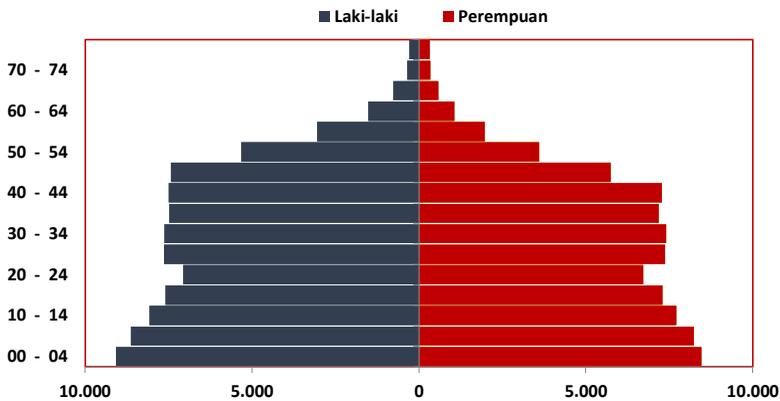


Gambar 3.2. Perkembangan Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Kecamatan, 2015-2017

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

Bagian terpenting dalam komposisi penduduk bukan hanya berdasarkan jenis kelaminnya saja, melainkan komposisi berdasarkan umur. Dengan diketahuinya kelompok umur penduduk maka akan mendorong kebijakan yang tepat manfaat. Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan hingga energi. Bahkan data kelompok umur juga bermanfaat dalam penyiapan kebijakan menghadapi kelompok masyarakat lanjut usia yang dari tahun ke tahun memberi dampak sosial yang semakin luas di suatu daerah.

Dari umur penduduk, dapat mencerminkan kategori penduduk disuatu wilayah tersebut apakah tergolong kategori penduduk tua ataukah muda. Pada umumnya penduduk berdasarkan kelompok umur lazim disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Kota Bontang sendiri termasuk kepada penduduk muda, hal ini ditunjukkan dengan lebih besarnya jumlah penduduk pada kelompok umur 25–44 tahun (lihat gambar 3.3).



Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kota Bontang, 2017

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas diolah)

Selain itu dengan komposisi umur dapat diketahui seberapa besar penduduk produktif dan tidak produktif. Penduduk produktif merupakan penduduk berumur 15-64 tahun. Penduduk di kelompok umur ini merupakan penduduk yang sejatinya aktif secara ekonomi. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk yang tergolong di kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Penduduk ini merupakan penduduk yang secara umum belum mampu dan sudah tidak mampu berkontribusi secara ekonomi. Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan usia produktif dikenal dengan Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK).

RBK dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. RBK merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase

RBK menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase RBK yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dalam ilmu kependudukan dikenal istilah bonus demografi dimana, jumlah penduduk tidak produktif lebih kecil (kurang dari 50%) dibanding penduduk yang produktif. Namun, usia produktif tidak serta merta menggambarkan kemampuan mereka dalam ekonomi secara nyata. Oleh karena itu tugas pemerintah agar besarnya usia produktif dapat terserap dan terlibat dalam dunia kerja, sehingga saat usia mereka produktif dapat memberi hasil maksimal khususnya dalam perekonomian bukan hanya sebagai konsumen. Karena besarnya usia produktif tidak hanya diharapkan sebagai pangsa pasar konsumsi tetapi lebih dari itu sebagai pendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru

Kota Bontang di tahun 2017 (sebagaimana di sajikan dalam Gambar 3.4) memiliki penduduk usia tidak produktif dibawah 50 persen bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Angka ini mengindikasikan bahwa Kota Bontang termasuk daerah yang menikmati bonus demografi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan penduduk produktif ini benar-benar terserap dalam dunia kerja dan bisa berkontribusi dalam penyiapan masa tua mereka, mengingat bonus demografi ini tidak akan berlangsung selamanya. Bahkan semakin baiknya kondisi kesehatan, maka akan

terjadi kecenderungan usia tua akan semakin meningkat yang otomatis akan menjadi beban secara ekonomi (menaikkan angka RBK), jika mereka tidak mempersiapkannya sejak dini seperti persiapan tabungan dan jaminan/asuransi masa tua.



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Tidak Produktif Kota Bontang, 2017
 Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

Pada tahun 2017 persentase penduduk produktif di Kota Bontang sebanyak 117.791 jiwa atau 69,04% dari total penduduk atau naik 0,04 persen dari tahun sebelumnya (lihat tabel 3.5). Yang menarik adalah penduduk usia 65 tahun ke atas yang kecenderungannya terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk dalam kelompok 0-14 tahun justru mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 terdapat 50.173 jiwa atau 30,40 persen, turun 0,34 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang, 2011-2017

Tahun	Umur	RBK
-------	------	-----

	0—14 tahun	15—64 tahun	65+ tahun	Total Penduduk Usia Produktif (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	45.714	100.851	1.846	67,95	47,16
2012	46.842	103.355	1.892	67,96	47,15
2013	48.005	105.936	1.939	67,96	47,15
2014	49.148	108.481	1.985	67,96	47,14
2015	50.282	111.011	2.033	68,79	47,13
2016	49.640	114.786	2.442	69,00	45,37
2017	50.173	117.791	2.647	69,04	44,84

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas diolah)

Pada tahun 2017 angka RBK Kota Bontang sebesar 44,84 yang berarti bahwa rata-rata setiap 100 jiwa penduduk produktif Kota Bontang menanggung sebesar 44–45 jiwa penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan yang sebelumnya RBK Kota Bontang sebesar 45,37. Dimana 45-46 jiwa penduduk non produktif yang harus ditanggung pada tahun 2016. Penurunan ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk pada kelompok umur produktif lebih cepat dari pada penambahan penduduk kelompok umur tidak/belum produktif.

3.2.2 GAMBARAN PENDIDIKAN

Prasarana Pendidikan

Berbicara pembangunan manusia, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber

daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Hanya bangsa yang cerdas yang dapat berikhtiar untuk mengetahui nasibnya dan juga kemampuannya untuk memperbaiki nasibnya. Selanjutnya hanya bangsa yang cerdas yang dapat menyadari pentingnya masa depan yang berisi tantangan-tantangan tetapi juga harapan kepada suatu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram dan lebih adil. Dan tentunya kecerdasan itu bersumber dari pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *'link and match'*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK. Seperti halnya Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang juga sangat konsen dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan mencanangkan program Bontang Cerdas mulai tahun 2010. Program dan kebijakan pemerintah Bontang dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera. Bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya dan berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah.

Tolak ukur umur dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan disuatu wilayah adalah penyediaan saran dan prasarana pendidikan danya memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid guru. Hal ini terdapat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, 2011-2017

Tahun	SD	SLTP	SMU/SMK /MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25
2014	60	33	25
2015	60	33	25
2016	61	35	26
2017	61	35	26

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Hingga tahun 2017 tidak terjadi perubahan jumlah sekolah disbanding tahun 2017 baik pada tingkat Sekolah Dasar maupun Menengah. Meski demikian, selama periode 2011 hingga 2017 tetap terjadi penambahan jumlah sekolah di Kota Bontang. Untuk SD terjadi penambahan 5 unit sekolah, kemudian SLTP bertambah 1 unit, dan SLTA bertambah 5 unit. Penambahan sekolah-sekolah tersebut tentunya dalam rangka memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Selain itu pembangunan sekolah juga dilakukan pada daerah-daerah yang selama ini berada cukup jauh dari sekolah yang sudah ada.

Rasio Murid-Guru

Selain indikator sarana pendidikan seperti jumlah sekolah, indikator rasio murid-guru merupakan indikator yang penting. Indikator ini

menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Selain itu, dengan indikator ini dapat melihat bagaimana kondisi kegiatan ajar-mengajar berkaitan dengan curahan perhatian guru terhadap murid.

Makin besar rasio murid-guru, maka semakin besar beban yang diampu tiap gurunya. Semakin besar murid yang diampu per gurunya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini dapat menuju makin rendahnya tingkat pengawasan /perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas. Rasio murid-guru dapat dilihat pada Tabel 3.4. dibawah ini.

Tabel 3.4. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2011-2017

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
SD	18,83	21,27	18,68	17,69	20,17	18,78	19,75
SLTP	12,71	14,54	15,28	13,86	16,76	15,62	15,19
SLTA	10,54	12,17	12,10	9,91	13,29	12,54	12,01

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tahun 2017 rasio murid guru dari semua jenjang SD mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa yang dibebankan kepada tiap

gurunya. Sementara itu untuk jenjang SLTP dan SLTA terus mengalami penurunan paling tidak sejak 3 tahun terakhir. Hal ini memberi arti bahwa beban guru SLTP dan SLTA terus berkurang yang berdampak pada peningkatan kualitas ajar-mengajar.

Penurunan rasio murid-guru dapat disebabkan adanya penambahan sekolah baru pada tiap jenjang pendidikan di Kota Bontang. Sehingga secara rata-rata rasio murid-guru menurun. Begitu juga dengan penambahan tenaga guru yang lebih besar daripada murid dapat mengakibatkan penurunan rasio murid-guru. Namun secara umum dalam enam tahun terakhir, terlihat bahwa rasio murid-guru di Kota Bontang masih berada pada kondisi ideal. Kecukupan jumlah guru pada tingkat sekolah dasar dan menengah tersebut tentu saja menjadi suatu nilai tambah yang positif bagi pembangunan bidang pendidikan di Kota Bontang. Dalam hal ini, pencapaian Kota Bontang sudah berada di atas pencapaian nasional yang angka rasio murid sekolah dasar dan menengahnya masih berkisar antara 25—30 murid per guru.

Tingkat Pendidikan Penduduk

Sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan ini adalah jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang telah ditamatkan, maka semakin baik sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat bersaing dalam dunia tenaga kerja dan menjadi pekerja ahli. Hal ini dapat dilihat dari penduduk 10 tahun ke atas

yang telah menamatkan di jenjang pendidikan tertentu. Berikut Tabel 3.5 menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2011-2017

Tahun	SD Kebawah	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38
2013	30,93	19,76	36,61	12,70
2014	32,72	18,11	38,40	10,77
2015	34,58	16,77	37,06	11,59
2016	42,87	11,04	33,66	12,42
2017	31,32	18,71	37,43	12,52

Sumber : BPS Kota Bontang

Tabel 3.5. menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, mayoritas penduduk Kota Bontang telah menamatkan pendidikan minimal SLTP dengan angka mencapai lebih dari 75 persen. Secara detil, dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penduduk Kota Bontang yang telah berpendidikan sarjana terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 12,52, meningkat tipis dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya persentase penduduk yang tamat SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi menjadi salah satu indikator bahwa pendidikan semakin mendapat posisi penting di Kota Bontang. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya pendidikan diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber

daya manusia yang terdidik bagi Kota Bontang guna peningkatan pembangunan daerah.

Selain itu, peningkatan persentase penduduk yang lulus SLTA menjadi gambaran bagi pemerintah Kota Bontang untuk memperjuangkan Sekolah Tinggi/Universitas di Kota Bontang. Hal ini untuk mengakomodir para lulusan tersebut agar bisa melanjutkan pendidikannya di Kota Bontang. Bisa saja mereka kuliah di luar daerah, tetapi tentunya biaya yang dikeluarkan pastilah lebih besar.

3.2.2.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Selain jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, untuk melihat kualitas pendidikan di suatu daerah juga diperlukan indikator lain adalah partisipasi sekolah. Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat mengukur seberapa besar daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan pendidikan dimana memperluas kesempatan bagi penduduk untuk

mengenyam pendidikan.

Sedangkan APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SLTP adalah perbandingan antara jumlah siswa SLTP yang berusia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Kebalikannya, nilai APM tidak bisa lebih dari 100 persen.

Nilai APM bertujuan mengukur berapa proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Nilai APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai APK, karena nilai APM tidak mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Selisih dari keduanya (APK dengan APM) merupakan persentase siswa yang terlambat masuk sekolah ataupun yang terlalu cepat masuk sekolah.

Tabel 3.6. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, 2017

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
SD	110,78	99,26
SLTP	82,18	71,56
SMU/SMK	102,38	71,20

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa daya serap jenjang SD memiliki angka tertinggi yakni 110,78 yang berarti diikuti jenjang SMU/SMK, dan SLTP. Besaran APK setiap jenjang pendidikan yang sudah di atas 80 persen menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kota Bontang

sudah mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target. Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki dunia sekolah. Oleh karena itu APK masih merupakan ukuran kasar untuk melihat partisipasi sekolah. Untuk mendapatkan angka yang lebih tepat maka digunakanlah Angka Partisipasi Murni (APM).

Masih dalam Tabel 3.6 terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kota Bontang adalah sekitar 99,26 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7—12 tahun, yakni sekitar 0,74 persen yang kemungkinan lebih muda dari 7 tahun atau lebih tua dari 12 tahun. Begitu pula pada tingkat pendidikan SLTP dan SLTA, nilai APM Kota Bontang masing-masing adalah 71,56 persen dan 71,20 persen. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

3.2.3 GAMBARAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dapat pula dijadikan sebagai barometer kesejahteraan seseorang. Dengan alasan tersebut, maka kesehatan dijadikan salah satu indikator pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya

kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, terlaksananya pelayanan kesehatan yang bersifat merata, terpadu dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat baik dilihat dari akses untuk memperoleh layanan kesehatan maupun kemampuan ekonomi masyarakat untuk belanja kesehatan.

Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Mengingat pentingnya faktor kesehatan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Upaya tersebut telah membuahkan hasil yaitu dengan tidak terputusnya Kota Bontang meraih Piala Adipura sejak tahun 2008 sampai tahun 2017. Bahkan pada tahun 2013, Kota Bontang mampu meraih Piala Adipura Kencana, yaitu sebuah anugerah tertinggi untuk kota terbersih di Indonesia dari Presiden RI. Selain itu penghargaan WTN bidang Ketertiban Lalu Lintas dan penghargaan sebagai Kota Sehat untuk kategori Swasti Saba Wistara Emas dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pun telah diraih oleh Kota Bontang.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian ASKES GAKIN, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) gratis, Jamkesprov, serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk klinik khusus pegawai pemerintah yang disebut dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), serta RSUD Kota Bontang.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah di bidang kesehatan, selain penghargaan-penghargaan di atas, dapat pula dilihat melalui beberapa indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan antara lain angka harapan hidup (AHH). Pada tahun 2017, AHH penduduk Kota Bontang mencapai 73,72 tahun. Usia harapan hidup bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa variabel lain di antaranya angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2017, prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bontang meliputi 5 unit Rumah Sakit, 6 unit Puskesmas, 12 klinik kesehatan, 2 puskesmas pembantu, dan 31 praktek dokter keluarga.

Derajat kesehatan masyarakat suatu daerah juga dapat diukur menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan pada perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Seperti diketahui bahwa AKB sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, terutama kesehatan dan gizi perempuan khususnya pada masa kehamilan, melahirkan dan masa menyusui, sehingga makin baik kondisi sosial ekonomi orang tua makin besar peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta berumur panjang. Besarnya AKB dapat mencerminkan tingkat kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Pada dasarnya penghitungan AKB dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) melalui program *mortpak*.

Definisi Anak lahir hidup (ALH) adalah banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya sedangkan anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki oleh seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Angka ini merupakan bahan perhitungan angka harapan hidup di suatu wilayah.

Tabel 3.7. menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup pada saat pencacahan dilaksanakan. Terlihat bahwa rata-rata jumlah anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang wanita yang pernah menikah di Kota Bontang adalah sekitar 2-3 orang anak. Sedangkan rata-rata anak yang masih hidup juga berkisar antara 2-3 orang, atau dengan kata lain tingkat kematian anak di Kota Bontang bisa dikatakan cukup rendah.

Tabel 3.7. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, 2011-2017

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ALH	2,45	2,60	2,36	2,49	2,37	2,41	2,50
AMH	2,37	2,44	2,27	2,36	2,31	2,32	2,43

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas diolah)

Indikator kesehatan lainnya pada pembangunan manusia yang dapat dijadikan sebagai alat ukur adalah angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan

persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap seluruh penduduk.

Persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar 23,46 persen. Angka ini terus menurun sejak dua tahun belakangan. Jika dibanding dengan tahun 2016 keluhan kesehatan turun sekitar 0,46 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selalu lebih tinggi dari pada persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini bisa disebabkan salah satunya karena proses kehamilan dan menstruasi.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2016-2017

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2016			
Ada keluhan	23,66	24,20	23,92
Tidak ada	76,33	75,79	76,07
Total	100,00	100,00	100,00
2017			
Ada keluhan	22,95	24,03	23,46
Tidak ada	77,05	75,97	76,54
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bontang

Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan

adalah dengan mendirikan Puskesmas Keluarga yang buka 24 jam yang menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Personal (UKP) sejak 1 Januari 2012. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah serta tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

Terkait pembangunan di bidang kesehatan, hal yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat dalam rumah tangga seperti fasilitas sumber air minum dan sanitasi. Mahatma Ghandi (1923) dalam Mara et al. (2010) mengatakan bahwa “*sanitation is more important than independence*”. Pentingnya sanitasi dan air bersih juga telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 silam yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, terdapat beberapa target terkait air bersih dan sanitasi.

Pentingnya air minum yang aman dan sanitasi telah lama dikenal berkaitan dengan kesehatan masyarakat secara umum dan khususnya terhadap kesehatan bayi dan anak-anak (Jones, 1923 dalam Cumming dan Cairncross, 2016). Air minum yang aman dan sanitasi merupakan penentu penting dari kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air minum yang kurang aman merupakan penyebab utama penyakit dan kematian, sebagai akibat dari infeksi virus, polusi kimia, dan kebersihan yang buruk (BPS, 2015). Itulah mengapa sejak 1966 Unicef telah mulai melakukan berbagai program terkait peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kesadaran akan kebersihan.

Tabel 3.9. Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga Kota Bontang, 2017

Sumber Air Minum	Persentase	Jumlah
(1)	(3)	(4)
Air Kemasan Bermerk	3,19	1.393
Air isi ulang	72,63	31.714
Air leding	23,04	10.058
Sumur bor/pompa	0,48	212
Sumur terlindung	0,09	39
Sumur tak terlindung	0,34	150
Mata air terlindung	0,19	81
Air hujan	0,04	18
Total	100,00	43.664

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

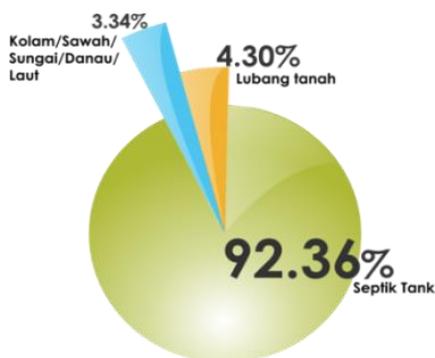
Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas kehidupan dimasa datang dengan keadaan fasilitas sanitasi dan air rumah tangga dimana seseorang tinggal dimasa kecilnya. Anak yang tinggal di dalam lingkungan yang sehat, maka lebih kecil kemungkinannya untuk sakit yang pada banyak kasus bahkan meninggal. Selanjutnya jika angka kematian bayi tinggi di suatu daerah maka usia harapan hidupnya akan semakin rendah dan akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Tabel 3.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, mayoritas penduduk Kota Bontang sudah menggunakan sumber air minum yang layak untuk kebutuhan air minumnya. Sumber air minum rumah tangga terbesar adalah air isi ulang, disusul leding dan air kemasan bermerk. Sedangkan rumah tangga pengguna air tak terlindung tidak lebih dari 1 persen. Namun, konsumsi air isi ulang juga sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri karena tidak semua depo isi ulang peduli terhadap kebersihan

wadah isi ulangnya. Begitu juga kualitas air leding yang selama ini dialirkan ke rumah tangga, kadangkala keruh, sehingga akan mengganggu kesehatan jika tetap digunakan untuk air minum

Gambar 3.5. Persentase Ruta Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Kota Bontang 2017

Sumber: BPS Kota Bontang (Susenas 2017, diolah)

Sementara itu dilihat kondisi sanitasi rumah tangga di tahun 2017



sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 3.5, terdapat lebih dari 50 persen rumah tangga di Kota Bontang yang sudah menggunakan septik tank sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun, masih ada sekitar 3,34 persen rumah tangga yang membuang kotoran di tempat terbuka. Keadaan ini dapat memudahkan tersebarnya virus atau bakteri penyebab penyakit.

3.2.4 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang serta memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus objek. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan berupa pengangguran.



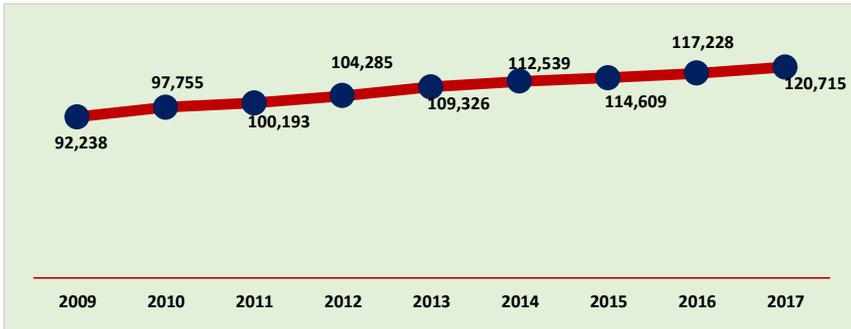
Gambar 3.6. Sinergitas Pembangunan dan Ketenagakerjaan

Sumber: UNDP, 2015

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta kesetaraan gender yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan manusia itu sendiri (lihat gambar 10). Gambar 10 menunjukkan betapa aspek ketenagakerjaan akan menjadi bagian siklus dalam pembangunan manusia.

Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang terlibat atau sedang berusaha terlibat di dalam aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, misalnya anak sekolah, ibu rumah tangga, orang-orang tua, dan orang-orang sakit yang sudah tidak mampu lagi bekerja.



Gambar 3.7. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2011-2017

Sumber: BPS Kota Bontang (Sakernas 2017, diolah)

Gambar 3.7 menunjukkan jumlah penduduk kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas selama kurun enam tahun terakhir. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah usia kerja. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 tercatat jumlah usia kerja di Kota Bontang sebanyak 120.715 orang atau meningkat sebesar 2,97 persen dari tahun 2016.

Keterlibatan penduduk di dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik sudah bekerja maupun sedang mencari kerja/menyiapkan usaha baru, dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Perbandingan tersebut dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi nilai TPAK makin banyak proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Selain nilai TPAK, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang berusaha

mencari pekerjaan secara aktif dengan jumlah angkatan kerja. Lawan TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur penduduk, jenis kelamin, struktur ekonomi, dan migrasi.

Tabel 3.10. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan kerja	77.557	71.838	75.621	78.895	na	77.882
Bekerja	66.399	63.899	68.526	69.371	na	68.190
Mencari kerja	11.158	7.939	7.095	9.524	na	9.692
TPAK (%)	73,00	65,86	67,20	68,84	na	64,52
TPT (%)	14,16	14,32	9,38	12,07	na	12,44

Sumber : BPS Kota Bontang (Sakernas 2017, diolah)

*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Semakin besar nilai TPT maka makin besar pengurangan kesempatan kerja dan begitu sebaliknya. Perkembangan nilai TPAK dan TPT Kota Bontang diperlihatkan oleh Tabel 3.10 di atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang pada tahun 2017 tercatat sebesar 64,52 persen. Nilai ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2015 yang tercatat sebesar 68,84 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja yang

meliputi penduduk bekerja dan pengangguran. Hal ini sebagai salah satu dampak dari PHK yang terjadi di beberapa perusahaan tambang dimana pekerja tersebut sangat banyak tinggal di Kota Bontang, selain itu mereka yang terkena PHK juga banyak yang meninggalkan Kota Bontang.

Indikasi ini juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang pada tahun 2017 yang juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 12,07 persen di tahun 2015 menjadi sebesar 12,44 persen pada tahun 2017. Angka tersebut mengandung makna bahwa untuk setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, terdapat 12-13 orang yang sedang mencari kerja (pengangguran). Persoalan pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, tetapi hal itu tidak selalu berlaku mutlak. Persoalan pengangguran dapat pula terjadi karena lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, bahkan jenis kelamin tenaga kerja yang ada.

Selain itu, ada juga sebagian orang yang memang memilih menjadi pengangguran karena memiliki sumber keuangan yang cukup untuk kehidupannya seperti bersumber dari bantuan orang tua, warisan, dsb. Oleh sebab itu, selain penambahan lapangan kerja, kesesuaian antara jenis lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan jenis kelamin tenaga kerja pun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator kebijakan adalah dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis, sehingga diharapkan

dengan makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat makin tinggi pula daya saing mereka di dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Walaupun tingkat pendidikan formal rendah, namun apabila keterampilan yang dimiliki mumpuni, seseorang masih dapat bekerja. Program lainnya yang dapat mengatasi pengangguran adalah penyediaan kredit yang mudah dan murah, sehingga diharapkan dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 3.11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang, 2012-2017

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	12,79	20,46	14,60	15,09	na	12,12
Usaha dengan buruh tidak tetap	7,84	8,31	11,07	6,60	na	7,00
Usaha dengan buruh tetap	4,43	4,15	5,17	3,46	na	2,48
Buruh/Karyawan/Pegawai	58,93	56,78	56,39	67,00	na	58,00
Pekerja tidak di bayar	14,78	9,38	10,15	4,44	na	12,33
Pekerja Bebas	1,23	0,93	2,61	3,39	na	8,06
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	na	100,00

Sumber: BPS Kota Bontang (Sakernas 2017, diolah)

*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai,

pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga), dan pekerja bebas. Dalam periode tiga tahun terakhir (lihat Tabel 3.10), struktur penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2017 tercatat sekitar 58 persen pekerja di Kota Bontang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Mereka umumnya bekerja di sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa. Kemudian penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dengan buruh tidak tetap dengan persentase masing-masing sebesar 12,12 persen dan 7,00 persen. Namun, jika dibanding dua tahun sebelumnya, proporsi penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan. Sedangkan proporsi penduduk dengan status usaha dengan buruh tak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Gambaran di atas semakin menguatkan bahwa dampak PHK selama ini cukup mempengaruhi perekonomian di Kota Bontang.

3.2.5 GAMBARAN PEREKONOMIAN

PDRB Kota Bontang

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu ekonomi Negara atau daerah dalam suatu periode tertentu. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah melakukan perubahan tahun dasar baru (Tahun 2010) berdasarkan rekomendasi PBB tentang penggantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali. Mengingat PBDR tahun dasar 2010 sudah berbasis SNA/*System*

of *National Accounts* dapat dibandingkan secara internasional, mampu menjaga konsistensi dan memperkecil perbedaan antara Kota Bontang dengan PDRB Regional (Provinsi dalam suatu wilayah).

Tabel 3.12. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang, 2011-2017

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	55.625.376,5	14.542.329,8	-7,42	4,85
2012	54.511.513,7	17.760.358,4	-9,18	15,62
2013	56.278.078,7	20.800.710,1	-5,72	8,64
2014	59.055.313,4	21.155.525,2	-3,23	3,70
2015	58.600.855,0	24.029.912,4	4,36	5,87
2016*	55.233.873,6	24.814.493,6	-1,38	0,14
2017**	58.787.632,1	25.755.125,6	0,68	1,36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

PDRB juga merupakan indikator kinerja suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersial untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada jenis lapangan usaha yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sebagai kota yang

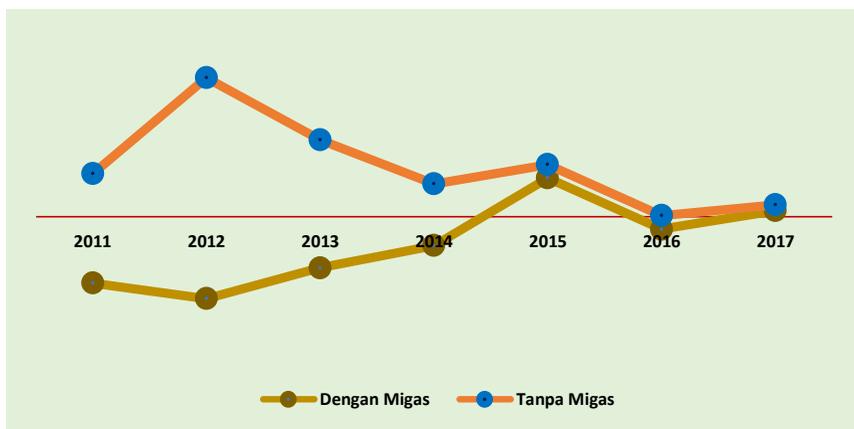
merupakan tempat beroperasinya dua perusahaan besar, yaitu PT. BADAQ NGL dan PT. Pupuk Kaltim, maka perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh kedua perusahaan itu. Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 3.12. dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku adalah sebesar 55,62 triliun. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 hingga mencapai 59,05 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2016 turun menjadi 55,23 triliun dan naik lagi menjadi 58,79 triliun. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi barang dan jasa, juga dipengaruhi oleh perubahan harga-harga komoditas.

Di tahun 2017, nilai PDRB Kota Bontang telah memberikan sumbangan sekitar 11,48 persen terhadap nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Nilai yang cukup besar ini utamanya disumbang oleh nilai tambah subsektor gas alam cair (LNG) yang merupakan produk utama PT. BADAQ NGL, dan sektor industri pengolahan yaitu komoditas pupuk yang merupakan produk utama PT. Pupuk Kaltim.

Untuk kepentingan analisis, PDRB dapat disajikan dengan migas dan tanpa migas. PDRB tanpa migas dihasilkan dengan cara mengeluarkan komponen minyak dan gas alam pada pertambangan dan industri pengolahan dari penghitungan PDRB. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah di luar sektor migas. Sepanjang tahun 2017, aktivitas ekonomi Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah tanpa migas sebesar 25,75 triliun rupiah.

Perbedaan yang cukup besar antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang sangat ditopang oleh sektor migas terutama gas alam cair (LNG). Perlu juga menjadi perhatian, bahwa walaupun PDRB tanpa migas terus tumbuh, hal tersebut tidak terlepas dari peran sektor migas yang begitu dominan di Kota Bontang.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang bergerak naik pada tahun 2017 dikarenakan nilai PDRB atas dasar harga berlakunya yang juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (lihat Gambar 3.8.).



Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2017 (persen)
 Sumber: BPS Kota Bontang

Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Bontang di tahun 2017 masih mampu naik walau tidak mencapai 1 persen. Tentunya ini

merupakan progres yang baik mengingat pada tahun 2016 nilai pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan positif juga terjadi pada PDRB tanpa migas walaupun masih di bawah pertumbuhan di tahun 2015 yang mencapai 5,87 persen. Grafik 3.8 juga menunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2011-2017.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan positif bermakna terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Bontang dengan migas (riil), terlihat bahwa sebelum tahun 2015 terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang negatif, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan naik lagi di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang fluktuatif selama 4 tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional. Kota Bontang sebagai kota industri sangat terpuuk ketika harga batu bara turun yang menyebabkan banyaknya PHK karyawan yang pada umumnya tinggal di Kota Bontang. Belum lagi anggaran Pemerintah yang mengalami pengurangan dari pemerintah pusat sehingga proses pembangunan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi tentunya tidak bisa berjalan optimal. Selain itu pertumbuhan

ekonomi yang negatif di tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya produksi dari sektor industri pengolahan gas alam cair dan pupuk yang.

Tabel 3.13. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas, 2017**

No	Lapangan Usaha	PDRB 2017	
		Nilai	Persentase Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	563.785,3	0,96
2	Pertambangan dan Penggalian	483.336,6	0,82
3	Industri Pengolahan	49.349.647,0	83,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.175,8	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.453,7	0,02
6	Konstruksi	2.886.704,5	4,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.468.937,8	2,50
8	Transportasi dan Pergudangan	701.316,5	1,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257.512,5	0,44
10	Informasi dan Komunikasi	401.215,3	0,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	400.030,9	0,68
12	Real Estate	234.353,1	0,40
13	Jasa Perusahaan	231.199,9	0,39
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	743.143,0	1,26
15	Jasa Pendidikan	513.588,4	0,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	343.631,8	0,58
17	Jasa Lainnya	180.600,0	0,31
	Total	58.787.632,1	100,00

** angka sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Apabila pengaruh sektor migas tersebut dikeluarkan dari nilai PDRB, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota

Bontang selalu positif (meningkat). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 4,85 persen kemudian sangat signifikan menjadi sebesar 15,62 persen pada tahun 2012. Berikutnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 3,70 persen pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 yang mencapai 5,86 persen.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang turun cukup dalam menjadi 0,14 persen saja. Namun, di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh lagi sehingga mampu menembus angka 1,36 persen.

Indikator lain yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perekonomian Kota Bontang sangat ditopang oleh aktivitas dua perusahaan besar yang ada di kota ini, yaitu PT. BADAQ dan PT. Pupuk Kaltim.

Kontribusi PT Badak dan PKT bagi perekonomian Kota Bontang paling tidak terlihat sejak 2000 hingga 2017. Selama periode tersebut, sumbangan sektor ini terus di atas 80 persen. Namun, yang perlu menjadi catatan penting adalah bahwa kontribusi sektor Industri pengolahan terus mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang jumlahnya tentu terus berkurang. Jika pada tahun 2000 (awal kota Bontang berdiri)

kontribusi sektor ini masih berada di angka 96,17 persen dan hingga saat ini, tahun 2017 angkanya telah turun menjadi 83,95 persen.

Sumbangan terbesar selanjutnya pada perekonomian Kota Bontang di tahun 2017 adalah Konstruksi (Bangunan) yaitu sekitar 4,91 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan besar, eceran yang mampu berkontribusi sekitar 2,50 persen terhadap keseluruhan nilai tambah bruto Kota Bontang.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun. Sedang pendapatan per kapita diperoleh dari Nilai PDRB yang telah dikurangi faktor penyusutan dan pajak tak langsung neto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas dan pendapatan per kapita dengan migas Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi produksi subsektor Industri Migas, dan kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika di pasaran internasional. PDRB per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2011-2017 dapat di lihat pada gambar berikut ini :

Tabel 3.14. Perkembangan PDRB Per Kapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (Ribu Rupiah), 2011-2017

PDRB Per Kapita	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dengan Migas	374.81	358.42	361.04	369.04	358.19	323.22	344.57
Tanpa Migas	97.99	116.78	133.44	131.59	146.53	147.20	150.67

*) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang tahun 2017 tercatat sebesar 344,57 juta rupiah. Meskipun angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi trennya terus menurun paling tidak sejak 2011. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.14., telah terjadi penurunan PDRB perkapita Kota Bontang sekitar 8 persen dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Sementara itu PDRB Perkapita tanpa migas justru mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 nilainya hanya 97,99 juta rupiah, maka pada tahun 2017 nilainya sudah mencapai 150,67 juta rupiah atau naik lebih dari 50 persen.

BAB 4

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Selama seperempat abad terakhir dunia telah berubah dan akan mempengaruhi perubahan lanskap pembangunan. Usia muda segera mendominasi populasi dunia, yang saat ini 1 dari 4 penduduk bumi adalah usia muda. Skenario geopolitik juga telah berubah, dengan negara-negara berkembang muncul sebagai kekuatan ekonomi utama dan kekuatan politik. Globalisasi telah mengintegrasikan orang, pasar dan pekerjaan, dan revolusi digital telah mengubah kehidupan manusia. Tentunya kesadaran akan kebutuhan dalam hidup akan dimiliki seluruh orang, sehingga kebutuhan hidup tersebut juga akan berusaha didapatkan.



Gambar 4.1. Pembangunan Manusia Kini dan Akan Datang
Sumber: UNDP, 2016

Manusia sebagai unsur utama dari seluruh kepentingan pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang 2018

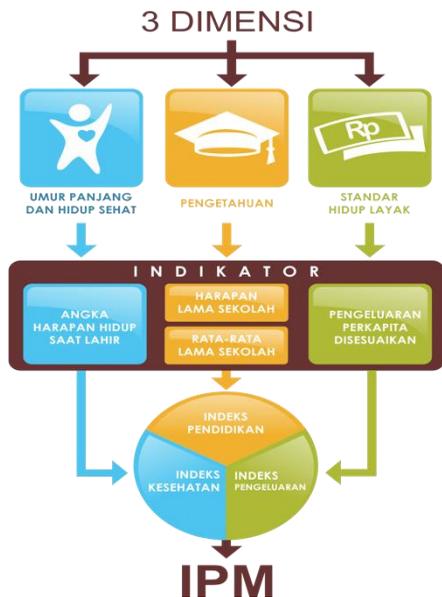
tuntutan ke arah terciptanya manusia yang berkualitas melalui pendidikan sebagai modal pembangunan pun makin besar. Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan pembangunan bukan berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan bagi manusia. Jadi tujuan pembangunan manusia tidaklah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada individu dalam memenuhi hak asasinya menentukan pilihan dengan bebas, mengembangkan kemampuan dan kesempatan berkarya, serta memiliki kehidupan yang kreatif dan sehat dalam jangka panjang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

Pada tahun 1999, *The United Nations Development Programme* (UNDP) yakni organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan dunia, menciptakan alat ukur yang dinamakan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan (IPM) yang digunakan banyak negara di dunia termasuk Indonesia. IPM dibuat dengan penekanan bahwa individu dengan kapabilitasnya mesti menjadi ukuran utama pembangunan suatu negara.

IPM merupakan ringkasan pencapaian rata-rata beberapa dimensi yakni: kehidupan yang sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi tersebut ditentukan dalam 4 indikator yakni angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Dari indikator-indikator tersebut akan diperoleh 3 indeks yang digunakan sebagai



Gambar 4.2. Dimensi, Indikator dan Indeks penyusun IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

penyusun IPM yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran (lihat gambar 4).

Dari hasil penghitungan indeks pembangunan manusia Kota Bontang tahun 2017, diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keberhasilan pembangunan manusianya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, dan faktor yang dominan selama ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan yang luas dalam membangun daerahnya. sehingga tiap daerah dapat menentukan prioritas mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Kota Bontang sebagai kota pemekaran juga menerapkan sistem prioritas tersebut. Dari sekian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, prioritas masih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur dalam peranannya terhadap pembangunan manusia adalah secara tidak langsung sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang paling terlihat jelas adalah terbangunnya sarana jalan yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan terbukanya akses ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat secara aktif menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100).

Reduksi Shortfall dihitung dengan:

$$r = \left[\frac{(IPM_{t+n} - IPM_t)}{(IPM_{ideal} - IPM_t)} \times 100 \right]^{1/n}$$

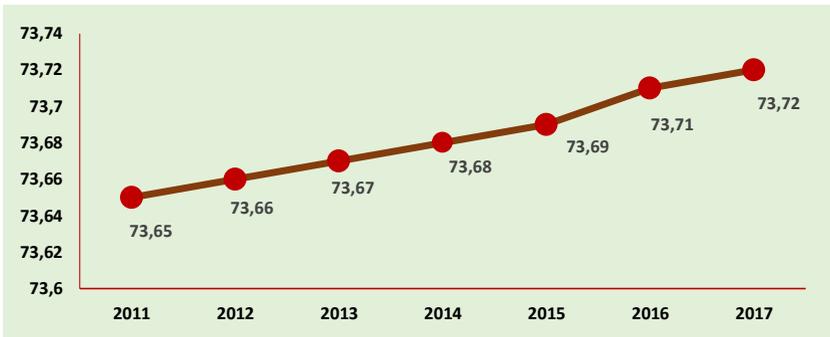
Dimana: r = reduksi *shortfall*
t = tahun
n = selisih tahun antar IPM
 IPM_{ideal} = 100

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa reduksi *shortfall* Kota Bontang 2017 adalah sebesar angka 2,67 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kota Bontang terus mengalami kemajuan yang cukup baik, segala upaya pemerintah dalam membangun kualitas manusia di Kota Bontang sudah menunjukkan hasil. Kemudian untuk peringkat antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan Kota dengan peringkat pertama atau yang tertinggi di Kalimantan Timur, sementara posisi kedua dan ketiga diduduki oleh kota Samarinda dan Balikpapan.

Berdasarkan kajian analisis IPM Kota Bontang, jika dilihat dari komponen-komponennya maka yang memberi nilai lebih bagi IPM Kota Bontang adalah komponen Pengeluaran rill yang disesuaikan merupakan yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian untuk komponen Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Hidup, Kota Bontang adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Balikpapan.

4.1.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

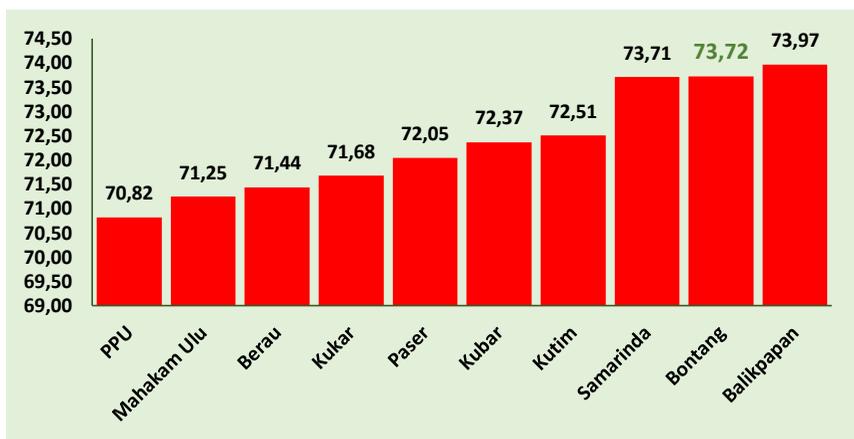
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.



Gambar 4.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang (tahun), 2011-2017

Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.3. di atas menunjukkan perkembangan AHH Kota Bontang selama periode 2011 hingga 2017. Pada gambar tersebut terlihat bahwa dalam kurun 6 tahun terakhir, AHH Kota Bontang terus mengalami peningkatan walaupun dalam hitungan bulan. Sejak 2011 hingga 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,07 poin. Peningkatan AHH yang memang cukup kecil memerlukan upaya komprehensif sehingga peningkatan AHH melalui penurunan angka kematian bayi dapat diwujudkan. AHH Kota Bontang tahun 2017 sebesar 73,72 tahun yang berarti, penduduk Kota Bontang yang lahir di tahun 2017 mempunyai peluang hidup berkisar 73 hingga 74 tahun.



Gambar 4.4. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (tahun), 2017

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Jika membandingkan tiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebagaimana disajikan dalam gambar, terlihat bahwa AHH di tahun 2017 bervariasi dari 70 hingga hampir 74 tahun. Penajam Paser Utara (PPU)

merupakan Kabupaten dengan AHH paling rendah yakni 70,82 tahun. Kemudian jika dibandingkan dengan AHH Kalimantan Timur yang nilainya 73,70 maka hanya ada 3 kabupaten/kota yang memiliki AHH melebihi nilai tersebut dan ketiganya merupakan daerah perkotaan. Melihat kondisi tersebut bisa diberikan kesimpulan awal bahwa pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas pengobatan gratis ikut mendongkrak kenaikan nilai komponen angka harapan hidup. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4.1.2 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 4.5 merupakan tren EYS Kota Bontang selama periode 2011 hingga 2017. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa EYS Kota Bontang terus naik dari 11,94 tahun di 2011 menjadi 12,88 tahun 2017. Kenaikan cukup besar terjadi dari tahun 2011 hingga 2014, dan setelah itu melandai hingga 2017.



Gambar 4.5. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2011-2017

Sumber: BPS Kota Bontang

Sementara itu di antara kabupaten/kota lainnya sebagaimana tersaji dalam gambar 8, EYS Kota Bontang menempati urutan keenam di wilayah Kalimantan Timur. Karenanya peningkatan sarana dan prasarana

sekolah memang harus terus ditingkatkan agar EYS Kota Bontang bisa turut terdongkrak. Begitu juga dengan kesadaran akan pentingnya sekolah yang berkualitas sehingga masyarakat menerima pendidikan sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Gambar 4.6. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (tahun), 2017

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur



Pemerintah Kota Bontang dalam beberapa tahun ini memang telah menangkap gejala ini. Pemerintah telah banyak melakukan program-program demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bontang antara lain dengan usaha-usaha seperti pembangunan sekolah baru, sebagai contoh SMK 4 di daerah Bontang Lestari, Sekolah untuk autis di Bontang Utara, Program pendidikan Tuntas Berkualitas, termasuk proses permintaan pendirian politeknik di Kota Bontang yang terus diperjuangkan oleh Walikota Bontang.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga

memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

4.1.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Gambar 4.7 memperlihatkan bahwa RLS Kota Bontang terus mengalami kenaikan. Jika periode 2011 hingga 2016 kenaikan yang landai yakni sekitar 0,01 s.d. 0,06, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi

kenaikan cukup berarti yakni 0,3 tahun. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 0,5 tahun sepanjang periode 2011 hingga 2017.

Gambar 4.7. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun), 2011-2017



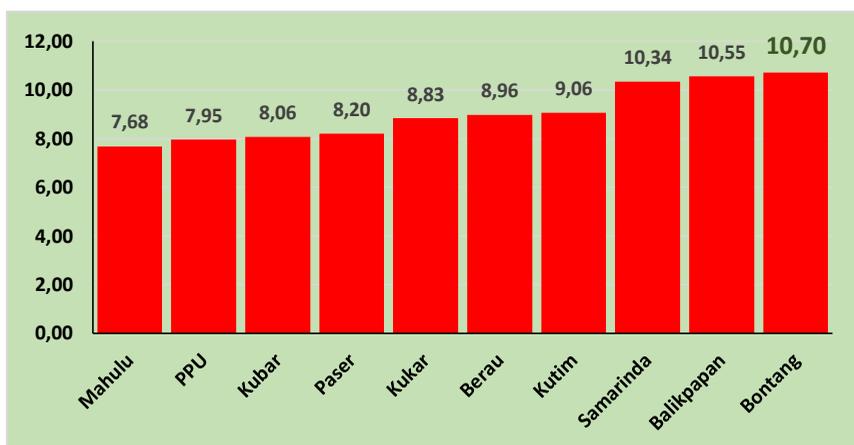
Sumber: BPS Kota Bontang

Rata-rata lama bersekolah Kota Bontang di tahun 2017 mencapai angka 10,7 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga sebelas atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bontang sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

Pada tahun 2017 terjadi lompatan cukup signifikan RLS Kota Bontang dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan Timur. Jika pada tahun 2016, RLS Kota Bontang berada diposisi kedua tepatnya 1 peringkat di bawah Kota Balikpapan, tetapi di tahun 2017 Kota Bontang berhasil menjadi wilayah dengan RLS tertinggi di Kalimantan Timur

Gambar 4.8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (RLS) (tahun), 2016-2017

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

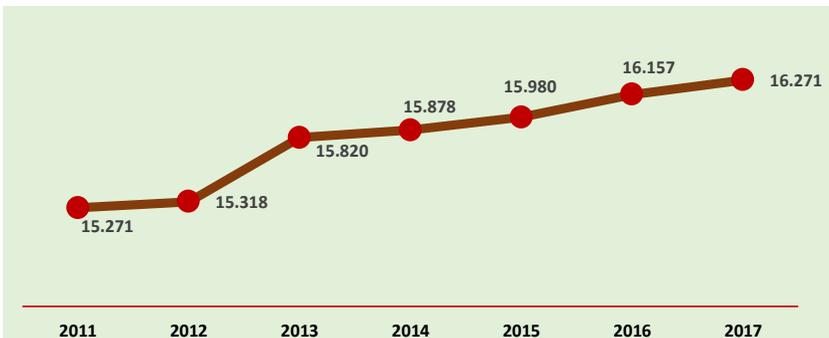


Jika dilihat secara keseluruhan sebagaimana disajikan dalam gambar 4.8., kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten dengan RLS paling rendah yakni 7,68 atau baru mampu mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP/ sederajat. Jika melihat rata-rata penambahan RLS, masih terlihat beberapa kabupaten/kota yang cukup rendah kenaikannya. Rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk

usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata.

4.1.4 RATA-RATA PENGELUARAN RIIL

Rata-rata pengeluaran riil Perkapita merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

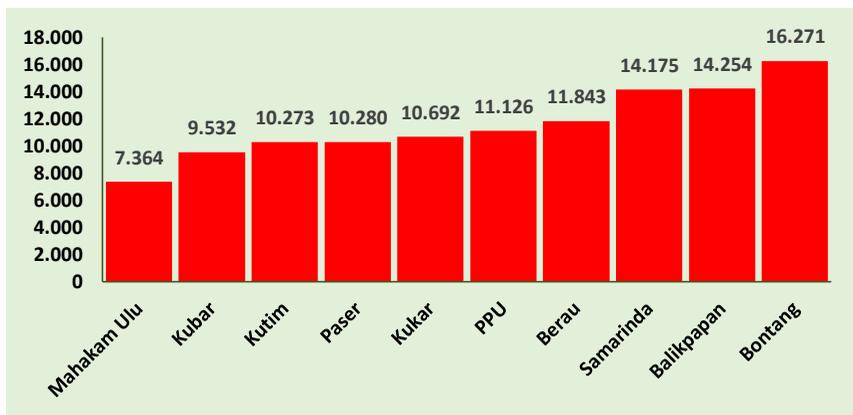


Gambar 4.9. Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2011-2017
Sumber: BPS Kota Bontang

Rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 16,157

juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 16,271 juta rupiah. Bahkan jika ditelusuri sejak 2011, maka telah terjadi kenaikan sebesar 6 persen (lihat Gambar 4.9).

Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.



Gambar 4.10. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (000 rupiah), 2017

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat rata-rata pengeluaran di seluruh wilayah Kalimantan Timur, Bontang menjadi daerah yang paling tinggi nilainya. Sebagaimana disajikan pada gambar 4.10 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa

terdapat perbedaan yang cukup besar antara Kota Bontang dengan daerah lainnya, bahkan dengan Kota Balikpapan dan Samarinda sekalipun.

Ke depannya, langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Produktivitas, PDRB per kapita.
2. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
3. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
4. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan

daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan.

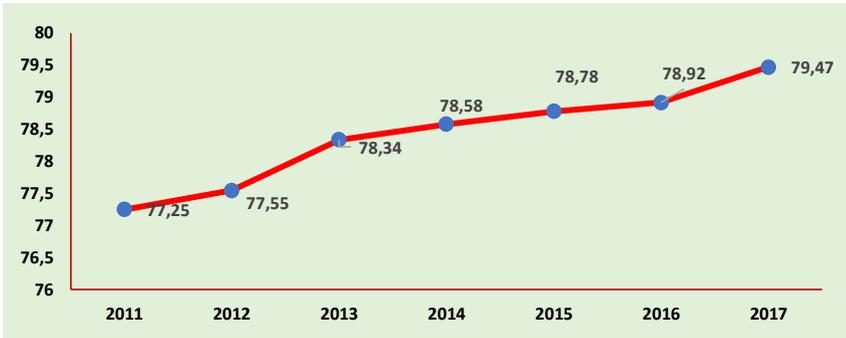
Tabel 4.1. Capaian AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran Riil Kota Bontang, 2011-2017

PDRB Per Kapita	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Harapan Hidup	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72
Angka Harapan Lama Sekolah	11,94	12,12	12,50	12,68	12,77	12,79	12,88
Rata-rata Lama Sekolah	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38	10,39	10,70
Pengeluaran Riil Perkapita	15.271	15.318	15.820	15.878	15.980	16.157	16.271

Sumber: BPS Kota Bontang

4.2 PERKEMBANGAN IPM KOTA BONTANG 5 TAHUN TERAKHIR

Sejalan dengan perkembangan masing-masing komponen pembentuknya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama lima tahun terakhir pun mengalami kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Selama 6 tahun terakhir yakni periode 2011 hingga 2017 telah terjadi kenaikan IPM Kota Bontang sebesar 2,22 poin. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja pemerintah dan masyarakat dalam upaya secara sadar mewujudkan pembangunan manusia di Kota Bontang. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan perekonomian serta kebijakan pemerintah yang terus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.



Gambar 4.11. Perkembangan IPM Kota Bontang (tahun), 2011-2017

Sumber: BPS Kota Bontang

Seperti terlihat pada Gambar 4.11, IPM Kota Bontang di tahun 2011 tercatat sebesar 77,25 kemudian naik menjadi 77,55 pada tahun 2013, dan terus meningkat hingga 79,47 pada tahun 2017. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Bontang cukup berhasil.

4.3 KECEPATAN MENCAPAI ANGKA IPM IDEAL (REDUKSI *SHORTFALL*)

Nilai ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah adalah 100 persen. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM pada hakikatnya adalah untuk mendekati angka ideal tersebut. Kecepatan perkembangan nilai IPM menuju nilai ideal dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut reduksi *shortfall*. Tabel 4.2 di bawah ini menyajikan perbandingan reduksi *shortfall* IPM kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2017.

Tabel 4.2. Perbandingan Reduksi *Shortfall* IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2017

Kabupaten/Kota (1)	IPM		Reduksi Shortfall (4)
	2016 (2)	2017 (3)	
Paser	71,00	71,16	0,55
Kutai Barat	69,99	70,18	0,64
Kutai	72,19	72,75	2,06
Kutai Timur	71,10	71,91	2,88
Berau	73,05	73,56	1,93
Penajam Paser Utara	69,96	70,59	2,14
Mahakam Ulu	65,51	66,09	1,71
Kota Balikpapan	78,57	79,01	2,97
Kota Samarinda	78,91	79,46	2,68
Kota Bontang	78,92	79,47	2,68

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

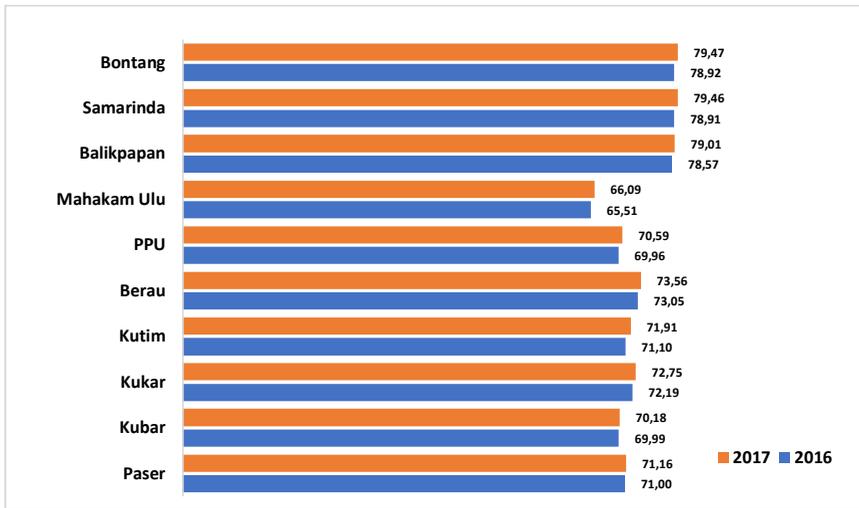
Tingkat kecepatan perkembangan IPM Kota Bontang menuju angka IPM ideal (100 persen) dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah

sebesar 2,68 persen. Nilai tersebut termasuk cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Secara keseluruhan masih terdapat 2 kabupaten dengan nilai di bawah 1 persen. Sedangkan untuk nilai di atas 2 persen terdapat 6 daerah, 2 di antaranya adalah daerah Kabupaten.

4.4 KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALTIM

Membandingkan IPM antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi bukanlah untuk melihat memberi kesan negatif bagi daerah yang memiliki IPM yang lebih rendah. Namun, bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia di daerah-daerah yang dibandingkan tersebut. Tujuannya adalah agar semua daerah terus terpacu untuk dalam meningkatkan kapasitas manusia di daerahnya masing-masing.

Secara umum tidak terjadi perubahan peringkat yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan peringkat pada tahun 2016. Empat peringkat teratas diduduki oleh Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Namun, terjadi perubahan posisi IPM antara Kabupaten Kutai Barat dengan dengan PPU. Pada tahun 2016, IPM PPU berada di bawah Kubar, tetapi maka pada tahun 2017 PPU berhasil menyalip IPM Kubar dengan selisih 0,41 poin. Perbandingan IPM kabupaten/kota selama dua tahun terakhir digambarkan oleh Gambar 4.12 berikut ini.



Gambar 4.12. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2016-2017

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Jika membandingkan capaian IPM dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kota Bontang patut berbangga. Sebab di tengah-tengah upaya pembangunan di masing-masing daerah, Kota Bontang masih menjadi daerah paling tangguh untuk bisa disalip keberhasilan pembangunan manusianya. Tiap daerah tentunya tak akan pernah berhenti dalam memajukan kualitas penduduknya, tetapi ternyata Bontang masih menjadi yang tercepat dalam melakukannya. Meskipun secara terpisah ada beberapa indeks yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang terutama Angka Harapan Lama Sekolah yang menempatkan Bontang pada posisi ke-6. Selain itu yang tak penting adalah upaya untuk terus menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR), yang pada gilirannya akan meningkatkan AHH Kota Bontang, yang pada tahun 2017 berada di posisi ke-2.

Tabel 4.3. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KALIMANTAN TIMUR	73,70	13,49	9,36	11.612	75,12	3*
Paser	72,05	12,98	8,20	10,280	71,16	7
Kutai Barat	72,37	12,82	8,06	9.532	70,18	9
Kutai Kartanegara	71,68	13,56	8,83	10.692	72,75	5
Kutai Timur	72,51	12,48	9,06	10.273	71,91	6
Berau	71,44	13,29	8,96	11.843	73,56	4
Penajam Paser Utara	70,82	12,53	7,95	11.126	70,59	8
Mahakam Ulu	71,25	12,47	7,68	7.364	66,09	10
Balikpapan	73,97	13,75	10,55	14.254	79,01	3
Samarinda	73,71	14,64	10,34	14,175	79,46	2
Bontang	73,72	12,88	10,70	16,271	79,47	1

*) peringkat nasional

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tapi mesti juga disadari bahwa pembangunan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur, tentunya memberikan gambaran pada kita bahwa masih terjadi ketidakmerataan perkembangan pembangunan di banyak sektor. Karena seperti yang kita tahu, walaupun IPM dihitung dari 3 dimensi sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, tetapi faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam perhitungan pastilah memberi pengaruh juga.

Sehingga dengan publikasi analisis pembangunan manusia ini, akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa pembangunan manusia masih merupakan tugas berat yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah di masing-masing daerah

terutama di daerah dengan IPM yang masih di bawah 66 (menengah bawah). Semoga pemerataan pembangunan terus terjadi, sehingga dampak pembangunan yang sesungguhnya bisa dirasakan seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan (BPS). Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembanguan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2017 adalah:

1. Angka IPM pada tahun 2017 mengalami perubahan metodologi penghitungan, alasannya adalah (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kota Bontang menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan IPM tertinggi sejak 2011 hingga 2017 dengan nilai IPM yang terus meningkat. Selama periode tersebut IPM Kota Bontang telah naik dari 77,25 di tahun 2011 menjadi 79,47 di tahun 2017 atau naik sebesar 2,22 poin.
3. Seluruh komponen IPM Kota Bontang di tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran perkapita masing-masing sebesar 0,01 persen, 0,7 persen, 2,98 persen, dan 0,7 persen. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kota Bontang terus berjalan baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.

5.2 SARAN

Kota Bontang merupakan daerah yang hingga tahun 2017 mengalami Bonus Demografi, dimana angka beban ketergantungan berada di bawah 50% yang artinya Kota Bontang mengalami surplus

usia produktif. Pemerintah diharapkan mampu menangkap momentum ini dengan terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga melimpahnya penduduk usia produktif, bisa terlibat di dunia kerja mampu berkontribusi dalam perekonomian. Selain itu harus ada gerakan sadar menabung untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sehingga di masa tua bisa tetap aktif dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain. Dalam penciptaan lapangan kerja ini, Pemerintah dapat berkaca pada angka pengangguran Kota Bontang, yang pada tahun 2017 berada pada angka 12,44 persen². Angka pengangguran yang cukup tinggi tentunya berdampak pada turunya pendapatan masyarakat dan selanjutnya dapat memperlambat laju perekonomian.

Capaian IPM Kota Bontang di tahun 2017 masih mengembirakan karena menempati posisi teratas di Kalimantan Timur. Kota Bontang unggul dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran riil perkapita Kota Bontang merupakan dampak dari keberadaan dua industri pengolahan berskala internasional di Kota Bontang. Hingga saat ini kedua industri tersebut memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bontang yang pada tahun 2017 mencapai 83,95 persen. Dominasi industri ini harus menjadi perhatian pemerintah karena keduanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga menggerakkan perekonomian dari sektor-sektor lain harus mulai dilakukan.

² Berdasarkan hasil Sakernas Kota Bontang tahun 2017

Capaian IPM Kota Bontang dalam bidang kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup (AHH) masih berada di bawah Kota Balikpapan. Meskipun sudah cukup tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk meningkatkan usia hidup seseorang perlu terus di lakukan. Tentunya tidak hanya berumur panjang tetapi juga sehat dan bisa aktif dalam masyarakat. Peningkatan AHH merupakan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR). Semakin rendah IMR maka AHH akan semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan IMR adalah menjaga kesehatan lingkungan, sanitasi, kualitas sumber air, dan perilaku hidup bersih. Selain itu penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Upaya tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran di masyarakat pentingnya kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya angka harapan hidup juga menjadi tantangan bagi Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah pada usia lanjut. Sehingga peningkatan AHH tidak dianggap menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Sebagaimana di sebutkan pada bagian sebelumnya gerakan investasi/menabung di masa muda harus menjadi kebiasaan, sehingga pada masa tua bisa hidup mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi

bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2016). *Siaran Pers: Menteri Sofyan: Indonesia Siap Mengimplementasikan SDGs*. Diakses tanggal 12 Mei 2017 <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/siaran-pers-menteri-sofyan-indonesia-siap-mengimplementasikan-sdgs/>
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*. <http://ipm.bps.go.id/page/ipm>. Diakses tanggal 12 Juni 2018.
- _____. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia (2007-2008)*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Cumming, O., & Cairncross, S. (2016). Can water, sanitation and hygiene help eliminate stunting? Current evidence and policy implications. *Maternal & child nutrition*, 12(S1), 91-105.
- Mara, D., Lane, J., Scott, B., & Trouba, D. (2010). Sanitation and health. *PLoS Med*, 7(11), e1000363.
- United Nations Development Programme (1990). *Human Development Report 1990*. Washington DC, USA: UNDP.
- United Nations Development Programme (2015). *Human Development Report 2015*. Washington DC, USA: UNDP.

